

**IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN DAN WILAYAH
HINTERLAND
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Unggul Priyadi, Eko Atmadji

Pusat Pengkajian Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
Jl. Prawiro Kuat, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: unggul.priyadi@uii.ac.id

ABSTRACT

In a local government, it is important to know the areas that have the potential to be the center of growth. Because with the determination of the growth center, it will be easier in accelerating regional development. The more advanced the growth center area hinterland area or support area will also progress. This study aims to analyze the districts / city that became the center of growth and hinterland area in the province of Yogyakarta Special Region. It can be analyzed using regional concentration analysis, scalogram analysis and gravity analysis. The results of the research show that in 2013 it was found Sleman Regency, Bantul Regency, Gunungkidul Regency, and Yogyakarta City as the center of growth. While in the year 2016 which became the center of growth is Sleman Regency, Bantul Regency and Yogyakarta City. In the analysis of geographical concentrations it is known that the facilities have been equally distributed in the districts / city of the Special Province of Yogyakarta. The research results have been in accordance with the Spatial Plan (RTRW) of Yogyakarta Province.

Keywords: Growth Center, Hinterland, Geography Concentration, Skalogram, Gravity

ABSTRAK

Dalam suatu pemerintahan daerah, penting untuk mengetahui daerah yang memiliki potensi untuk dijadikan pusat pertumbuhan. Karena dengan ditentukannya pusat pertumbuhan, maka akan lebih mudah dalam mempercepat pembangunan daerah. Semakin majunya wilayah pusat pertumbuhan maka wilayah hinterland atau wilayah pendukung juga akan semakin maju. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kabupaten / kota yang menjadi pusat pertumbuhan dan wilayah hinterland di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dapat dianalisis menggunakan analisis konsentrasi daerah, analisis skalogram dan analisis gravitasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2013 didapati Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan. Sedangkan pada tahun 2016 yang menjadi pusat pertumbuhan adalah Kabupaten Sleman, kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Dalam analisis konsentrasi geografi diketahui bahwa fasilitas-fasilitas telah terdistribusi secara merata di kabupaten / kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian telah sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Yogyakarta.

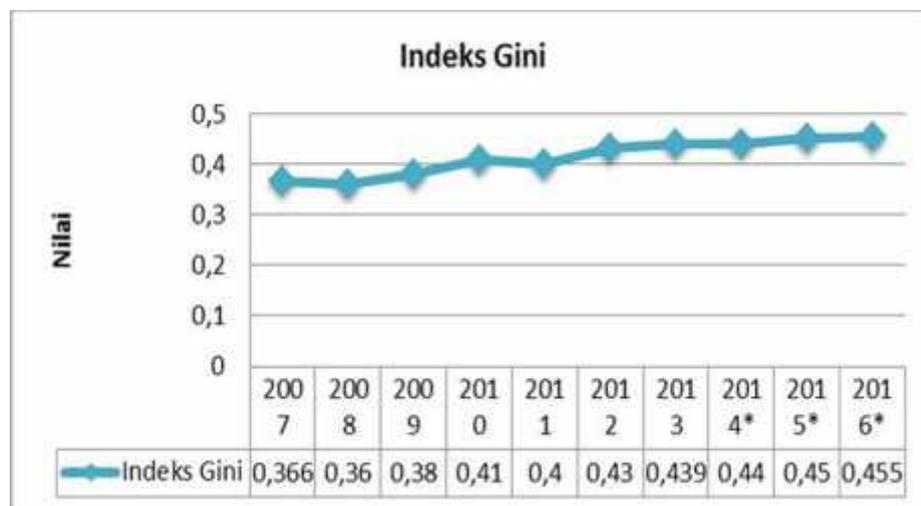
Kata Kunci : Pusat Pertumbuhan, Hinterland, Konsentrasi Geografi, Skalogram, Gravitasi.

PENDAHULUAN

Hampir semua negara berkembang memiliki permasalahan yang sama seperti masalah kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan kriminalitas (Todaro dan Smith, 2009). Untuk meningkatkan kualitas negara, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah, diperlukan usaha dan perencanaan yang matang dan terencana. Menurut UU No. 32 tahun 2004

Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan ke pemerintah daerah otonom guna mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam sistem NKRI.

Data dalam LKJ Daerah Istimewa Yogyakarta 2014 menunjukkan bahwa indeks gini dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa kesenjangan pendapatan di masyarakat semakin melebar.



Indeks gini menunjukkan capaian yang belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Pelambatan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 turut mempengaruhi pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpendapatan rendah. Pada tahun 2016 nilai indeks gini sebesar 0,45 yang terus meningkat sejak tahun 2007 yang nilainya sebesar 0,36.

Solusi untuk mempercepat pembangunan adalah dengan menetapkan pusat pertumbuhan pada wilayah tersebut. Hal tersebut dapat mengatasi keterbatasan dana dalam melaksanakan pembangunan dengan berfokus pada satu wilayah, yaitu daerah yang berperan sebagai pusat

pertumbuhan, dalam meningkatkan pembangunannya, bisa berupa pelengkapan fasilitas dan perbaikan infrastruktur. Diharapkan daerah pusat pertumbuhan dapat menimbulkan *spillover effect* positif pada daerah *hinterland* dari daerah pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan merupakan wilayah yang dijadikan pusat perdagangan, pusat industri, pusat pelayanan, dan pusat perekonomian.

Infrastruktur dan fasilitas sangatlah berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat maupun pembangunan wilayah. Juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesenjangan antar wilayah. Semakin lengkap fasilitas yang dimiliki oleh suatu daerah maka

masyarakat dapat lebih mudah dalam mengaksesnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada. Pertumbuhan ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan dapat memberikan manfaat atau *spillover effect* positif terhadap *hinterland*, sehingga gap yang ada tidak terlalu besar. Dengan menentukan pusat pertumbuhan dengan memfokuskan pertumbuhan terutama perekonomian pada daerah tersebut, akan menyebarkan efek yang menguntungkan bagi wilayah-wilayah disekitarnya. Perkembangan wilayah pusat pertumbuhan akan meningkatkan produksi daerah *hinterland* sehingga daerah *hinterland* juga akan mengalami perkembangan.

Banyaknya jumlah perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta menimbulkan tingginya tingkat imigran yang datang untuk berkuliah di universitas-universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan makin banyaknya jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu untuk melakukan peningkatan fasilitas sebagai pendorong kegiatan ekonomi maupun pelayanan terhadap masyarakat. Fasilitas yang dimiliki oleh tiap kabupaten / kota pasti berbeda-beda. Perbedaan fasilitas tersebut akan menjadi hierarki penentuan wilayah pusat pertumbuhan. Kabupaten / kota yang memiliki fasilitas yang paling lengkap akan menjadi wilayah pusat pertumbuhan. Dan kabupaten / kota yang fasilitasnya kurang, akan menjadi *hinterland* atau wilayah pendukung bagi wilayah pusat. Penentuan wilayah pusat pertumbuhan dan *hinterland* dapat diketahui dengan menggunakan analisis skalogram. Serta analisis gravitasi digunakan untuk melihat keterkaitan atau interaksi pada tiap-tiap kabupaten / kota yang menjadi pusat

pertumbuhan dengan kabupaten / kota sebagai *hinterland*.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Istimewa Yogyakarta di masing-masing kabupaten / kota dalam penetapan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagaimana tingkat persebaran geografis ketersediaan fasilitas publik pada masing-masing kabupaten / kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kesesuaian penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Istimewa Yogyakarta di masing-masing kabupaten / kota dalam penetapan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menganalisis tingkat persebaran geografis ketersediaan fasilitas publik pada masing-masing kabupaten / kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian, selain menggunakan teori-teori, juga digunakan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan dan gambaran dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Gulo (2015). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kecamatan-kecamatan

yang berada di Kabupaten Nias. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil dari analisis dengan menggunakan skalogram bahwa di Kabupaten Nias yang menjadi pusat pertumbuhan utama adalah Kecamatan Gido, pusat pertumbuhan kedua adalah Kecamatan Idanogawo dan pusat pertumbuhan ketiga yaitu Kecamatan Botomuzoi. Kecamatan Gido dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan utama karena memiliki fasilitas yang paling lengkap serta memiliki fungsi yang lebih besar dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Semakin lengkap fasilitas ekonomi dan sosial yang dimiliki maka akan menarik minat masyarakat untuk beraktivitas di wilayah tersebut.

Penelitian oleh Nainggolan (2013), bertujuan untuk menemukan pusat pertumbuhan di Kabupaten Simalungun dan melihat hubungan antara daerah pusat pertumbuhan dengan daerah pinggirannya (*hinterland*). Hasil dari analisis skalogram didapatkan 30 jenis fasilitas dari keseluruhan fasilitas yang berada di Kabupaten Simalungun. Hasil analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut menunjukkan ada 5 kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Siantar dengan Kecamatan Gunung Malela sebagai *hinterlandnya*, Kecamatan Bandar dengan *hinterlandnya* Kecamatan Pematang Bandar, Kecamatan Tanah Jawa dengan *hinterlandnya* Kecamatan Hatonduhan, Kecamatan Raya dengan Kecamatan Panei sebagai daerah *hinterland*, dan Kecamatan Bosar Maligas dengan Kecamatan Bandar.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Utari (2015), bertujuan untuk mengetahui karakteristik Kota Yogyakarta dan mengetahui kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dilihat dari

kelengkapan fasilitas yang tersedia yang disesuaikan dengan pusat pertumbuhan Kota Yogyakarta. Penelitian menggunakan alat analisis skalogram. Dari hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaksesuaian hasil analisis skalogram dengan kecamatan yang diproyeksikan untuk menjadi pusat kota dalam RTRW Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta memroyeksikan Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Danurejan sebagai pusat pertumbuhan. Namun hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Gondokusuman memiliki fasilitas yang lebih baik daripada kecamatan-kecamatan lain walaupun Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Gondokusuman bukanlah kecamatan yang diproyeksikan untuk menjadi pusat pertumbuhan di Kota Yogyakarta.

Penelitian oleh Danastri (2011), bertujuan untuk mengetahui kekuatan interaksi antar daerah di Kecamatan Harjamukti, menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mengembangkan pusat pertumbuhan, serta untuk mengetahui wilayah pembangunan mana saja yang dapat ditetapkan sebagai kutub pertumbuhan untuk mendorong pembangunan wilayah Kecamatan Harjamukti. Metode analisis yang digunakan dengan analisis basis ekonomi secara survey primer, analisis gravitasi, analisis skalogram, dan metode overlay. Dari hasil analisis menggunakan gravitasi, dapat diketahui bahwa semua kelurahan yang ada di Kecamatan Harjamukti memiliki interaksi kuat dengan pusat Kecamatan Harjamukti, yaitu Kelurahan Kalijaga. Dengan analisis skalogram, dapat diurutkan kelurahan dengan fasilitas terlengkap adalah Kelurahan Kecapi,

Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Kalijaga, Kelurahan Larangan, dan Kelurahan Argasunya sebagai kelurahan dengan jumlah fasilitas paling sedikit.

Penelitian yang dilakukan oleh Habib (2016), bertujuan untuk mengetahui kecamatan mana yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan hubungan interkasi antara pusat pertumbuhan dengan kawasan *hinterland*. Penelitian dilakukan dengan menggunakan skala ordinal dan indeks gravitasi. Hasil yang dapat adalah Kecamatan Tulang Bawang Tengah sebagai ibukota dan pusat pemerintahan dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, menjadi pusat pertumbuhan dengan tiga daerah *hinterland* yaitu Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar dan Kecamatan Pagara Dewa. Interkasi paling kuat dengan pusat pertumbuhan didapatkan dari Kecamatan Tulang Bawang Udik yang lokasinya lebih dekat dengan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan nilai interaksi sebesar 6.943.036,09. Sedangkan kekuatan interaksi dengan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan Kecamatan Tumijajar sebesar 5.084.954,9, dan kekuatan interaksi dengan Kecamatan Pagara Dewa sebesar 51.360,47.

Landasan Teori

Teori Pusat Pertumbuhan

Teori pusat pertumbuhan atau *Growth Poles Theory* diperkenalkan oleh ekonom asal Perancis, Francis Perroux. Sjafrizal (2008) menjelaskan teori Perroux tentang *pole croisanse* atau *pole de development* yang artinya pusat pertumbuhan sebagai perangkat industri-industri yang sedang mengalami perkembangan dan berlokasi di suatu

daerah perkotaan dan mendorong perkembangan lanjut dari kegiatan ekonomi melalui daerah pengaruhnya. Juga dikatakan bahwa “*growth does not growth*”, hal tersebut ditemukannya dalam analisisnya terhadap industri kendaraan yang cenderung terkelompok pada daerah tertentu. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada daerah tertentu yang didorong oleh adanya keuntungan aglomerasi (*Agglomeration Economies*) yang timbul karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut. Munculnya beberapa konsentrasi tersebut kegiatan ekonomi tersebut selanjutnya mendorong pula pada peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi yang berdampak positif pada pembangunan ekonomi nasional.

Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral dikemukakan oleh seorang ahli geografi Jerman yaitu Walter Christaller. Hartono (2007) menjelaskan teori Christaller tentang kota sentral yang merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lainnya. Menurut Christaller setiap orde memiliki wilayah heksagonal sendiri-sendiri. Bentuk pola pelayanan heksagonal ini secara teoritis mampu memperoleh optimasi dalam hal efisiensi transportasi, pemasaran dan administrasi (Hagget, 2001). Kota sebagai pusat pelayanan diharapkan memiliki fasilitas pelayanan seperti,

- a. Pusat dan pertokoan sebagai fokus point dari suatu kota.
- b. Saranan dan prasarana transportasi.
- c. Tempat rekreasi dan olahraga.
- d. Sarana pendidikan, kesehatan, obyek wisata.

Dengan demikian kota menyediakan segala fasilitas bagi kehidupan baik sosial

maupun ekonomi, sehingga baik tempat tinggal maupun bekerja dan berkreasi dapat dilakukan didalam kota (Jayadinata, 1992).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Konsep teori Hirschman yang dipaparkan oleh Sjafrizal (2008), menyatakan bahwa lebih mengutamakan perhatiannya pada pertumbuhan wilayah tidak seimbang. Dimana secara geografis pertumbuhan ekonomi wilayah akan dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan di suatu wilayah pada satu titik tempat yang menimbulkan dorongan ke arah perkembangan titik-titik atau tempat-tempat berikutnya. Teori Hirschman melihat tingkat pembangunan di suatu wilayah cenderung tercapai pada beberapa titik pertumbuhan. Dimana kegiatan atau aktivitas ekonomi lebih lebih berpusat pada daerah tersebut karena ketersediaan dan kelengkapan fasilitas pelayanan dibandingkan tempat lainnya. Dampaknya akan terjadi peningkatan migrasi dari daerah luar ke daerah *growing center*.

Teori Gravitasi

Teori gravitasi pertama kali diperkenalkan dalam ilmu fisika oleh Sir Issac Newton. Utoyo (2007) memaparkan inti dari teori gravitasi bahwa dua buah benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik menarik antara keduanya yang dikenal sebagai gaya gravitasi. W. J. Reilly berpendapat bahwa bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memerhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut.

Teori gravitasi ini dapat digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh interaksi antar wilayah yang berdekatan secara kuantitatif, dengan asumsi bahwa

suatu wilayah sebagai benda dan jumlah penduduk dari wilayah yang bersangkutan sebagai massanya. Besarnya kekuatan interaksi dapat diwujudkan dalam bentuk besarnya perpindahan atau transportasi dan komunikasi antara dua wilayah. Wujud dari perpindahan tersebut dapat berbentuk orang, barang, jasa, ataupun berupa informasi (Hartono, 2007).

Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 Pasal 1 angka 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Haris memaparkan peranan Smith tentang pemerintah di daerah yang dijalankan secara demokratis akan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk ikut menuangkan kedaulatannya. Hal ini bukan saja akan memperkuat proses demokrasi lokal, tetapi juga memberikan kontribusi bagi demokrasi dan integrasi nasional (Haris dkk, 2006).

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029, bertujuan untuk:

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.

- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan sejahtera dan berkelanjutan.
- d. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- e. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna.
- f. Mencegah benturan kepentingan dalam penggunaan sumber daya.
- g. Meningkatkan kondisi alam dan prasarana untuk mengembangkan pariwisata
- h. Meningkatkan prasarana dan sarana untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan.

Arahan pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Wilayah direncanakan sebagai berikut :

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) : Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta), meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten / kota Depok, sebagian Kabupaten / kota Ngaglik, sebagian Kabupaten / kota Mlati, sebagian Kabupaten / kota Godean, sebagian Kabupaten / kota Gamping, sebagian Kabupaten / kota Ngemplak, sebagian Kabupaten / kota Kasihan, sebagian Kabupaten / kota Sewon, sebagian Kabupaten / kota Banguntapan.
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : Kawasan Perkotaan Sleman, Bantul.
- c. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi : Kawasan Perkotaan Wates dan Wonosari. (PKWp).
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Kawasan Perkotaan Kokap,

Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Panjatan, Lendah, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, Pundong, Jetis, Pleret, Seyegan, Turi, Cangkringan, Patuk, Dlingo, Panggang, Paliyan, Ngawen, Tepus, Ponjong, Mlati, Ngaglik, Prambanan, Piyungan, Srandakan, Godean.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif untuk melihat wilayah kabupaten / kota yang menjadi pusat pertumbuhan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menganalisis fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten / kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis data yang diteliti adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari sumber lain. Dalam penelitian ini data yang didapatkan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan media internet. Untuk melakukan analisis pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data tentang jumlah fasilitas-fasilitas sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh 5 kabupaten / kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama kabupaten / kota tersebut yaitu,

1. Kabupaten Kulonprogo
2. Kabupaten Bantul
3. Kabupaten Gunungkidul
4. Kabupaten Sleman
5. Kota Yogyakarta

Dari tiap kabupaten / kota akan dilihat apa saja fasilitas yang tersedia, serta berapa banyak jumlahnya. Jenis-jenis fasilitas yang dilihat antara lain,

1. Sarana pendidikan
2. Sarana kesehatan
3. Tempat ibadah
4. Sarana perekonomian

Metode Analisis

Analisis Konsentrasi Geografi

Konsentrasi geografis mengukur tingkat persebaran fasilitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut

$$GC = 100\sqrt{\sum \left(\frac{x_i}{x_t}\right)^2}$$

Keterangan:

GC : tingkat konsentrasi geografis

x_i : jumlah fasilitas pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten / kota

x_t : jumlah keseluruhan fasilitas pertumbuhan di Kabupaten Sleman

Setelah dilakukan perhitungan GC, dilanjutkan dengan membandingkan nilai GC batas tengah. Adapun GC batas tengah (GC_{BT}) merupakan penjumlahan GC batas atas dan batas bawah dibagi dua.

Nilai GC batas atas (GC_{BA}) merupakan besaran konsentrasi geografis yang diasumsikan komoditi ekspor hanya tertuju di satu wilayah. Adapun konsentrasi geografis batas bawah (GC_{BB}) menunjukkan besaran konsentrasi geografis yang diasumsikan komoditi ekspor tersebar secara merata.

Secara ringkas perhitungan GC_{BT} adalah:

$$\frac{(G_{BA} + G_{BB})}{2}$$

Untuk menentukan suatu sarana terkonsentrasi atau terdistribusi dilakukan dengan cara membandingkan perhitungan nilai GC dibandingkan nilai GC_{BT} .

Analisis Skalogram

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model skalogram. Skalogram adalah alat analisis untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan fasilitas yang dimiliki, sehingga dapat ditentukan hierarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah (Rondinelli, 1985).

Analisis ini digunakan untuk melihat jumlah dan jenis fasilitas yang berada pada tiap kecamatan di Kabupaten Sleman. Dari jumlah ketersediaan fasilitas tersebut dapat ditentukan kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Sleman adalah kecamatan yang paling lengkap fasilitasnya. Sedangkan kecamatan yang ketersediaan fasilitasnya kurang lengkap akan menjadi wilayah *hinterland* atau wilayah pendukung. Rumus yang digunakan untuk mencari banyak kelas pada setiap kecamatan sebagai pusat pertumbuhan sebagai berikut,

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan:

k = banyak kelas

n = banyak kecamatan

selanjutnya menentukan besarnya interval kelas atau *range* dengan rumus sebagai berikut,

$$\text{Range} = \frac{A-B}{k}$$

Keterangan:

A = jumlah fasilitas tertinggi

B = jumlah fasilitas terendah

k = banyak kelas

Langkah terakhir dalam melakukan analisis skalogram adalah dengan menghitung Coeffisien of Reproducibility

atau COR, yang memiliki fungsi untuk menguji kelayakan analisis skalogram. Penelitian dengan analisis skalogram dapat dikatakan layak jika nilai COR sebesar 0,9 sampai dengan 1. Cor dihitung dengan rumus seperti dibawah,

$$(CR) = 1 - \frac{\sum e}{N}$$

Keterangan:

CR : tingkat kesalahan

$\sum e$: Jumlah kesalahan

N : Jumlah fasilitas

K : Jumlah kecamatan

Analisis Gravitasi

Analisis gravitasi digunakan untuk melihat besarnya daya tarik suatu potensi yang berada pada suatu lokasi, kaitan potensi suatu lokasi dengan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut (Utoyo, 2007).

Rumus gravitasi adalah sebagai berikut,

$$A_{ij} = k \frac{P_i \cdot P_j}{d_{ij}^b}$$

Keterangan :

A_{ij} = Besarnya interaksi wilayah i dengan wilayah j

P_i = Jumlah penduduk di wilayah i, dalam ribuan jiwa

P_j = jumlah penduduk di wilayah j, dalam ribuan jiwa

d_{ij} = Jarak dari wilayah i dengan wilayah j, dalam kilometer

k = Angka konstanta empiris, bernilai 1

b = Pangkat dari d_{ij} yang sering digunakan b=2

Untuk melihat keterkaitan atau interaksi antara kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dengan kecamatan yang menjadi *hinterland* atau wilayah pendukungnya.

HASIL DAN ANALISIS

Peran Danais (Dana Istimewa) dalam Menggerakkan Ekonomi

Gambaran Umum Pelaksanaan Perdais

1. Arah Kebijakan Dana Keistimewaan DIY Tahun 2017
 - a) Meningkatkan kualitas perencanaan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta.aa
 - b) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c) Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah.
 - d) Mewujudkan ketepatan penggunaan dana keistimewaan DI Yogyakarta dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.
2. Dana Keistimewaan DIY (UU No.13 Tahun 2012)

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang dimiliki DIY:

- a) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b) Kelembagaan
- c) Kebudayaan
- d) Pertanahan
- e) Tata Ruang.

Analisis Konsentrasi Geografi

Konsentrasi geografis mengukur tingkat persebaran fasilitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perhitungan dengan analisis konsentrasi geografi dipaparkan dalam tabel. Dari analisis GC pada tabel ditemukan bahwa nilai perhitungan GC lebih kecil dari nilai batas tengah. Dengan nilai GC sebesar 141,4214, dan nilai batas tengah sebesar 72,36068, dengan nilai GC

lebih besar dari nilai tengah, berarti fasilitas yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sudah terdistribusi secara merata di 5 kabupaten / kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga jika akan menambahkan fasilitas yang sudah ada di pusat pertumbuhan, jika ingin ditambahkan di masing-masing kabupaten / kota, maka penambahan tersebut sebaiknya dilakukan secara proporsional.

Analisis Skalogram

Analisis skalogram digunakan untuk menganalisis dan menentukan hierarki atau kelasnya. Jumlah fasilitas tersebut digunakan sebagai penentuan dalam menempatkan suatu lokasi menjadi pusat pertumbuhan dan lokasi sebagai daerah *hinterland* atau daerah belakangnya. Setelah didapatkan jumlah total dari semua fasilitas yang ada pada tiap kabupaten / kota, selanjutnya adalah membuat tabel perhitungan yang memberikan angka “1” pada jenis fasilitas yang dimiliki oleh kabupaten / kota, dan memberikan angka “0” pada fasilitas yang tidak tersedia pada kabupaten / kota tersebut.

Dari tabel hasil analisis dapat dilihat jumlah fasilitas dari masing-masing kabupaten / kota pada empat kelompok fasilitas yang berbeda, serta jumlah total dari semua unit fasilitas tiap kabupaten / kota. Dapat diketahui yang termasuk dalam orde I adalah kabupaten / kota dengan jumlah unit fasilitas terbanyak sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Dalam hasil analisis skalogram dalam tabel diketahui terdapat 3 kabupaten / kota yang memenuhi syarat untuk masuk dalam orde I sebagai kabupaten / kota pusat pertumbuhan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pusat pertumbuhan pertama

adalah Kabupaten Bantul yang memiliki 19 jenis fasilitas dan 11.983 unit fasilitas. Pusat pertumbuhan kedua yaitu Kabupaten Sleman dengan 19 jenis fasilitas dan unit fasilitas sebanyak 10.681. Dan pusat pertumbuhan ketiga adalah Kota Yogyakarta dengan 19 jenis fasilitas dan 4.682 unit fasilitas. Kabupaten / kota yang masuk dalam orde I merupakan kabupaten / kota dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan kabupaten pada orde II dan III.

Pada orde II terdapat Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah jenis fasilitas sebanyak 18 jenis, dan jumlah unit sebanyak 10.244 buah, namun terdapat ketidaklengkapan data pada kategori sarana pendidikan yaitu tidak diketahuinya jumlah perguruan tinggi yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul. Jumlah unit fasilitas yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul lebih banyak daripada jumlah unit yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Namun karena jenis fasilitas yang dimiliki Kota Yogyakarta lebih banyak daripada jenis fasilitas yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul, maka Kota Yogyakarta berada pada orde I sedangkan Kabupaten Gunungkidul berada di orde II. Karena untuk menentukan daerah pusat pertumbuhan adalah dengan melihat banyaknya jenis fasilitas yang dimiliki oleh daerah tersebut, bukan hanya dari jumlah unit yang dimilikinya. Jika melihat jumlah penduduk pada Kabupaten Gunungkidul, maka jumlah unit fasilitas yang dimiliki sudah cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Orde III diisi oleh Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah jenis 17 fasilitas, dan jumlah unit sebanyak 3.783. Kabupaten Kulonprogo memiliki jumlah penduduk sebanyak 412.198 jiwa, merupakan jumlah penduduk paling

sedikit dibandingkan dengan kabupaten / kota lainnya. Jumlah tersebut terpaut tidak terlalu jauh dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta, namun jumlah unit fasilitas yang dimiliki oleh Kabupaten Kulonprogo jauh lebih sedikit daripada Kota Yogyakarta. Begitu pula dengan jenis fasilitas yang dimilikinya.

Dari tabel hierarki pusat pertumbuhan kabupaten / kota berdasarkan analisis skalogram di provinsi daerah istimewa yogyakarta tahun 2013, dapat dilihat jumlah fasilitas dari masing-masing kabupaten / kota pada empat kelompok fasilitas yang berbeda, serta jumlah total dari semua unit fasilitas tiap kabupaten / kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013. Dapat diketahui yang termasuk dalam orde I adalah kabupaten / kota dengan jumlah unit fasilitas terbanyak sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Dalam hasil analisis skalogram dalam Tabel 4.19 diketahui bahwa terdapat 4 kabupaten / kota yang memenuhi syarat untuk masuk dalam orde I sebagai daerah pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan pertama adalah Kabupaten Sleman dengan jumlah jenis fasilitas ada 19, dan jumlah unit fasilitas sebanyak 15.665 unit. Pusat pertumbuhan kedua adalah Kabupaten Bantul dengan memiliki jenis fasilitas berjumlah 19, dan unit fasilitas yang dimiliki sebanyak 12.404 unit. Kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pertumbuhan ketiga dengan jumlah jenis fasilitas ada 19 jenis, dan jumlah unit fasilitas sebanyak 11.480. Namun jumlah unit tersebut belum lengkap karena terdapat ketidaklengkapan data yaitu pada sarana pendidikan, tidak diketahui jumlah perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Dan pusat pertumbuhan ke empat adalah Kota

Yogyakarta dengan 19 jenis fasilitas dan jumlah unit fasilitas sebanyak 7.400 unit.

Pada hasil analisis skalogram tahun 2013 ini tidak terdapat kabupaten / kota yang masuk dalam orde II. Sedangkan pada orde III terdapat Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah jenis fasilitas sebanyak 18 jenis, dan jumlah unit fasilitas yang dimiliki ada 6.198 unit. Jumlah unit fasilitas yang dimiliki Kabupaten Kulonprogo tidak terlalu berbeda dengan jumlah unit fasilitas yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Namun karena perbedaan jumlah jenis fasilitas, maka Kabupaten Kulonprogo masuk dalam orde III. Terdapat banyak perbedaan antara hasil analisis skalogram untuk melihat daerah pusat pertumbuhan di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 dan tahun 2016.

Di amati dari tabel kesimpulan hasil analisis skalogram, pada segi jumlah penduduk, semua kabupaten / kota mengalami kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2013 ke tahun 2016. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka diperlukan peningkatan jumlah unit fasilitas maupun jumlah jenis fasilitas untuk melengkapi kebutuhan masyarakat. Namun hal tersebut berbanding negatif terhadap jumlah unit fasilitas pada tiap-tiap kabupaten / kota. Semua kabupaten / kota mengalami penurunan jumlah unit fasilitas yang dimiliki. Seperti Kabupaten Sleman yang jumlahnya turun dari 15.665 menjadi 10.681, Kabupaten Bantul dengan unit fasilitas sebanyak 12.404 turun menjadi 11.983. Kabupaten Gunungkidul memiliki unit fasilitas 11.480 dengan ketidaklengkapan data, namun turun menjadi 10.244 unit dengan ketidaklengkapan data. Kota Yogyakarta juga mengalami penurunan jumlah unit fasilitas dari 7.400 menjadi 4.682 un it.

Begitu pula dengan Kabupaten Kulonprogo yang jumlah unitnya turun dari 6.198 menjadi 3.783. Dalam penelitian ini tidak diketahui penyebab turunnya jumlah unit fasilitas pada kabupaten / kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada jumlah jenis fasilitas, Kabupaten Sleman, kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta memiliki jumlah yang tetap, yaitu 19 jenis fasilitas. Namun pada kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo terjadi penurunan jumlah jenis fasilitas. Pada tahun 2013 jumlah jenis fasilitas di Kabupaten Gunungkidul adalah 19 jenis fasilitas, tetapi pada tahun 2016 jumlah jenis fasilitas turun menjadi 18 jenis saja. Hal serupa juga terjadi pada Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah jenis fasilitas pada tahun 2013 sebanyak 18 jenis, pada tahun 2016 jumlah tersebut turun menjadi 17 jenis fasilitas.

Hasil analisis menunjukkan perubahan orde pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo. Sedangkan untuk Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta berada pada orde yang sama pada dua periode tahun yang berbeda yaitu berada pada orde I. Pada tahun 2013, Kabupaten Gunungkidul berada pada orde I dan dapat menjadi daerah pusat pertumbuhan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan terjadinya penurunan jumlah jenis fasilitas, maka pada tahun 2016 Kabupaten Gunungkidul menempati orde II dan lepas dari daerah pusat pertumbuhan. Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2013 berada pada orde II, tetapi penurunan yang terjadi pada jumlah jenis fasilitas menyebabkan Kabupaten Kulonprogo menempati orde III pada tahun 2016.

Analisis Gravitasi

Dalam melakukan pengamatan dengan menggunakan analisis gravitasi dapat dilihat bahwa Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumbuhan pertama memiliki nilai interaksi yang paling besar terhadap Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo. Sehingga Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo merupakan *hinterland* bagi Kabupaten Bantul. Nilai interaksi Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul sebesar 407.568.522, sedangkan dengan Kabupaten Sleman hanya sebesar 286.377.964, dan interaksi dengan Kota Yogyakarta sebesar 199.190.109. Nilai interaksi Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Bantul sebesar 620.706.322, dengan Kabupaten Sleman sebesar 293.434.959, dan dengan Kota Yogyakarta sebesar 156.212.822.

Untuk melihat wilayah *hinterland* dari kabupaten / kota yang menjadi pusat pertumbuhan pada tahun 2013, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta dapat dijelaskan pada tabel. Hasil analisis skalogram menyatakan bahwa pada tahun 2013 terdapat empat kabupaten / kota yang menjadi wilayah pusat pertumbuhan, sehingga hanya ada satu kabupaten yang menjadi wilayah *hinterland*, yaitu Kabupaten Kulonprogo. Pada diketahui bahwa nilai interaksi tertinggi dari Kabupaten Kulonprogo terhadap kabupaten / kota sebagai pusat pertumbuhan adalah dengan Kabupaten Bantul. Sehingga Kabupaten Kulonprogo adalah wilayah *hinterland* bagi Kabupaten Bantul. Nilai interaksi Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Bantul adalah sebesar 591.883.954. angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai interaksi dengan Kabupaten

Sleman yaitu sebesar 280.689.276, dengan Kota Yogyakarta sebesar 149.103.284, dan nilai interaksi terendah adalah dengan Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 80.022.538.

Jika mengamati kedua periode dari analisis, yaitu periode tahun 2013 dan tahun 2016, terjadi perubahan pada nilai interaksi antara kabupaten / kota sebagai pusat pertumbuhan dengan kabupaten sebagai *hinterland*. Pada periode tahun 2013 terdapat empat pusat pertumbuhan yaitu Kabupaten Bantul, kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta, dengan Kabupaten Kulonprogo sebagai wilayah *hinterland* bagi Kabupaten Bantul. Namun pada tahun 2016, jumlah kabupaten / kota sebagai pusat pertumbuhan menurun menjadi tiga kabupaten / kota, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul berpindah menjadi wilayah *hinterland* bagi Kabupaten Bantul bersama dengan Kabupaten Kulonprogo yang dari tahun 2013 tetap menjadi wilayah *hinterland* bagi Kabupaten Bantul.

Perbandingan dengan RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029, arahan pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah direncanakan sebagai berikut :

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) : Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta), meliputi Kota Yogyakarta,

Kecamatan Depok, sebagian
Kecamatan Ngaglik, sebagian
Kecamatan Mlati, sebagian
Kecamatan Godean, sebagian
Kecamatan Gamping, sebagian
Kecamatan Ngeplak, sebagian
Kecamatan Kasihan, sebagian
Kecamatan Sewon, sebagian
Kecamatan Banguntapan.

- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : Kawasan Perkotaan Sleman, Bantul.
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Kawasan Perkotaan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Panjatan, Lendah, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, Pundong, Jetis, Pleret, Seyegan, Turi, Cangkringan, Patuk, Dlingo, Panggang, Paliyan, Ngawen, Tepus, Ponjong, Mlati, Ngaglik, Prambanan, Piyungan, Srandakan, Godean.

Pada dapat dilihat perbandingan hasil dari analisis skalogram, analisis gravitasi, dan kebijakan RTRW.

Dari tabel hasil analisis dibandingkan kebijakan rtrw dengan data tahun 2015, dapat diketahui pencapaian dari kondisi sebenarnya di masing-masing kabupaten / kota jika dibandingkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut hasil analisis, terdapat kesesuaian analisis setelah dibandingkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten / kota yang dianalisis masuk dalam orde I yaitu sebagai wilayah pusat pertumbuhan, seperti Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, telah diproyeksikan untuk masuk dalam wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sedangkan untuk wilayah *hinterland* yaitu

Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masuk pada wilayah Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Hal tersebut telah sesuai dengan hasil analisis menggunakan skalogram dan analisis gravitasi.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis konsentrasi geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh hasil bahwa sarana – sarana yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah terdistribusi secara merata di 5 kabupaten / kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk analisis skalogram, analisis gravitasi dan kesesuaian pencapaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan kabupaten / kota yang menjadi pusat pertumbuhan. Pada tahun 2013 terdapat empat kabupaten kota yang menjadi pusat pertumbuhan yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta, dengan Kabupaten Kulonprogo sebagai *hinterland* Kabupaten Bantul memiliki nilai interaksi 591.883.954. Sedangkan tahun 2016 ada tiga kabupaten / kota yang menjadi pusat pertumbuhan yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, dengan *hinterland* dari Kabupaten Bantul adalah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki nilai interaksi 407.568.522, dan Kabupaten Kulonprogo dengan nilai interaksi 620.706.322. Untuk melihat pencapaian

masing-masing kabupaten / kota jika dibandingkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat kesesuaian antara proyeksi dengan hasil analisis skalogram dan analisis gravitasi.

Implikasi

Berdasarkan dari hasil analisis, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan masukan bagi pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keadaan tiap kabupaten / kota telah sesuai dengan proyeksi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, akan lebih baik jika menambahkan fasilitas-fasilitas pada kabupaten yang menjadi wilayah *hinterland* agar tidak terjadi kesenjangan dengan wilayah kabupaten / kota sebagai pusat pertumbuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danastri, S. (2011). "Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru di Kabupaten / kota Harjamukti, Cirebon Selatan". *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gulo, Y. (2015). "Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Hinterland Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias". *Widyariset*, Volume 18 Nomor 1, Halaman 37-48.
- Habib, S. (2016). "Analisis Kabupaten / kota Dalam Rangka Penentuan Kabupaten / kota Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat". *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ekonomi

- dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Hagget. (2001). *Geography: A Global Synthesis*. New Jersey: Pearson Education Ltd.
- Haris, S., Pabottingi, M., Hidayat, S., Salamm, A., Ratnawati, T., & Romli, L. (2006). *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Hartono. (2007). *Geografi: Jelajah Bumi dan Alam Semesta*. Bandung: Citra Raya.
- Jayadinata, J. (1992). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah Bandung*. Bandung: ITB.
- Nainggolan, P. T. (2013). "Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 1 Nomer 12, Halaman 15-26.
- Rondinelli, D. A. (1985). *Applied Methods of Regional Analysis, The Spatial Dimensions of Development Policy*. Colorado: Westview Press.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Terapan*. Padang: Baduose Media.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Aksara Bumi.
- Todaro, & Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang otonomi Daerah. (t.thn.). Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (t.thn.). Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. (t.thn.). Departemen Dalam Negeri Indonesia.
- Utari, E. S. (2015). "Analisis Sistem Pusat Pelayanan Pemukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2014". *Journal of Economics and Policy*, Volume 8 Nomor 1, Halaman 1-88.
- Utoyo, B. (2007). *Geografi: Membuka Cakrawala Dunia*. Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- Yani, A., & Ruhimat, M. (2007). *Geografi: Menyingkap Fenomena Geosfer*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Alokasi dan Usulan
Dana Keistimewaan di Yogyakarta

No.	Bidang Kewenangan	Alokasi (miliar Rupiah)				Usulan (miliar Rupiah)
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur & Wakil Gubernur	-	0,4	-	-	3,8
2.	Kebudayaan	212,5	375,1	420,8	179,1	603,5
3.	Pertanahan	6,3	23,0	10,6	13,9	15,2
4.	Kelembagaan Pemerintahan	2,5	1,6	1,7	1,8	34,7
5.	Tata Ruang	10,0	123,6	114,4	352,7	916,4
Jumlah		231,3	523,8	547,5	547,5	1.573,8

Lampiran 2

Usulan, Alokasi dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2013 – 2017

TA	USULAN	ALOKASI	REALISASI	% Real thd Alokasi
2013	535.214.033.670	231.392.653.500	54.562.180.053	23,58%
2014	787.703.769.500	523.874.719.000	272.056.608.289	51,93%
2015	1.023.273.302.700	547.450.000.000	477.494.515.166	87,22%
2016	1.397.466.516.999	547.450.000.000	???	???
2017	1.573.834.354.400	???	???	???

Lampiran 3

Tabel Perhitungan Analisis Konsentrasi Geografis

Kabupaten / kota	Jumlah Unit	GC	Batas Bawah	Batas Atas	Nilai Tengah
Kabupaten Kulonprogo	3783	0,182944	44,72136	100	72,36068
Kabupaten Bantul	11983	0,579491			
Kabupaten Gunungkidul	10244	0,495394			
Kabupaten Sleman	10681	0,516527			
Kota Yogyakarta	4666	0,225645			
Jumlah	41357	2			
Akar		1,414214			
x100		141,4214			

Lampiran 4

Tabel Kesimpulan Data Jumlah Fasilitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Fasilitas				Jumlah Total
	Pendidikan	Kesehatan	Ibadah	Perekonomian	
Kabupaten Kulonprogo	792	187	1144	1660	3783
Kabupaten Bantul	1075	249	1860	8799	11983
Kabupaten Gunungkidul	1238*	251	1992	6763	10244*
Kabupaten Sleman	1259	238	2125	7059	10681
Kota Yogyakarta	549	145	490	3498	4682

Sumber: Kabupaten / kota dalam Angka 2015, diolah BPS Kabupaten Sleman

Keterangan *: Terdapat ketidaklengkapan data

Lampiran 5

Tahun 2015

Kabupaten / Kota	Jenis Fasilitas																			Jumlah
	Pendidikan					Kesehatan						Tempat Ibadah					Perekonomian			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Kabupaten Kulonprogo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	17
Kabupaten Bantul	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
Kabupaten Gunungkidul	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
Kabupaten Sleman	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
Kota Yogyakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19

Keterangan Tabel:

Sarana Pendidikan

- 1 : TK
- 2 : SD
- 3 : SLTP
- 4 : SMA
- 5 : Perguruan Tinggi

Sarana Kesehatan

- 6 : Rumah Sakit
- 7 : Puskesmas
- 8 : Puskesmas Pembantu
- 9 : RS. Bersalin
- 10 : Poliklinik
- 11 : Pos KB Desa

Tempat Ibadah

- 12 : Masjid
- 13 : Gereja Katolik
- 14 : Gereja Kristen
- 15 : Pura
- 16 : Wihara

Sarana Ekonomi

- 17 : Pasar Umum
- 18 : Pertokoan Kios / Warung
- 19 : KUD, Bank, BPR

Dari perhitungan tersebut menunjukkan tingkat kesalahan sebesar 0,936, berada diantara 0,9 – 1 atau lebih dari 90%, sehingga analisis skalogram pada fasilitas-fasilitas di tiap kabupaten / kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 ini dianggap sudah layak.

Lampiran 6

Hierarki Pusat Pertumbuhan Kabupaten / Kota berdasarkan Analisis Skalogram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

Peringkat Hierarki	Kabupaten / kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Jenis Fasilitas	Jumlah Unit Fasilitas	Orde Kota
1	Kabupaten Bantul	971.511	19	11983	Orde I
2	Kabupaten Sleman	1.167.481	19	10681	Orde I

3	Kota Yogyakarta	412.704	19	4682	Orde I
4	Kabupaten Gunungkidul	715.282	18	10244*	Orde II
5	Kabupaten Kulonprogo	412.198	17	3783	Orde III

Keterangan *: Terdapat ketidaklengkapan data

Lampiran 7

Tabel Kesimpulan Data Jumlah Fasilitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Fasilitas				Jumlah Total
	Pendidikan	Kesehatan	Ibadah	Perekonomian	
Kabupaten Kulonprogo	788	183	1110	4117	6198
Kabupaten Bantul	1062	214	1721	9407	12404
Kabupaten Gunungkidul	1235*	239	1896	8110	11480*
Kabupaten Sleman	1249	230	2064	12122	15665
Kota Yogyakarta	555	142	548	6155	7400

Sumber: Kabupaten / kota dalam Angka 2015, diolah BPS Kabupaten Sleman

Keterangan *: Terdapat ketidaklengkapan data

Lampiran 8

Tabel Skalogram Tahun 2013

Kabupaten / Kota	Jenis Fasilitas																			Jumlah	
	Pendidikan					Kesehatan						Tempat Ibadah					Perekonomian				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Kabupaten Kulonprogo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	18
Kabupaten Bantul	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
Kabupaten Gunungkidul	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
Kabupaten Sleman	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
Kota Yogyakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19

Keterangan Tabel:

Sarana Pendidikan	11	: Pos KB Desa	
1	: TK	Tempat Ibadah	
2	: SD	12	: Masjid
3	: SLTP	13	: Gereja Katolik
4	: SMA	14	: Gereja Kristen
5	: Perguruan Tinggi	15	: Pura
Sarana Kesehatan	16	: Wihara	
6	: Rumah Sakit	Sarana Ekonomi	
7	: Puskesmas	17	: Pasar Umum
8	: Puskesmas Pembantu	18	: Pertokoan Kios / Warung
9	: RS. Bersalin	19	: KUD, Bank, BPR
10	: Poliklinik		

Selanjutnya adalah menghitung dengan menggunakan metode Struges untuk menentukan orde-orde dari pusat pertumbuhan.

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah Orde} &= 1 + 3,3 \log n \\
 &= 1 + 3,3 \log 5 \\
 &= 1 + 3,3 (0,6989700043) \\
 &= 1 + 2,3066010143 \\
 &= 3,306601014
 \end{aligned}$$

Jumlah orde dalam penelitian ini sebesar 3,3066010143 yang dibulatkan menjadi 3 kelas atau orde untuk kabupaten / kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya adalah menentukan interval kelas atau *range* untuk 3 orde yang telah dihitung sebelumnya. Yaitu dengan rumus,

$$\text{Range} = \frac{J_k \quad nF \quad t_i \quad -J_k \quad n f_i \quad t_i \quad n}{B \quad K \quad a \quad O}$$

$$\text{Range} = \frac{1 - 1}{3}$$

$$\text{Range} = 0,3$$

Didapatkan interval kelas atau *range* sebesar 0,3, dengan jumlah kelas atau *orde* sebanyak 3, maka dapat dibuat tabel orde seperti dibawah,

Tabel *Orde* dan *Range*

Orde	Range
Orde I	18,7 - 19
Orde II	18,3 – 18,6
Orde III	17,9 – 18,2

Langkah terakhir dalam melakukan analisis skalogram adalah dengan menghitung tingkat kesalahan atau disebut Coefficient of Redductibility (COR).

$$(CR) = 1 - \frac{\sum e}{N}$$

$$(CR) = 1 - \frac{2}{1 \times 5}$$

$$(CR) = 1 - 0,021$$

$$(CR) = 0,979$$

Dari perhitungan tersebut menunjukkan tingkat kesalahan sebesar 0,979, berada diantara 0,9 – 1 atau lebih dari 90%, sehingga analisis skalogram pada fasilitas-fasilitas di tiap kabupaten / kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini dianggap sudah layak.

Lampiran 9

Hierarki Pusat Pertumbuhan Kabupaten / kota berdasarkan Analisis Skalogram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Peringkat Hierarki	Kabupaten / kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Jenis Fasilitas	Jumlah Unit Fasilitas	Orde Kota
1	Kabupaten Sleman	1.141.684	19	15665	Orde I
2	Kabupaten Bantul	947.066	19	12404	Orde I
3	Kabupaten Gunungkidul	700.192	19	11480*	Orde I
4	Kota Yogyakarta	402.709	19	7400	Orde I
5	Kabupaten Kulonprogo	403.203	18	6198	Orde III

Keterangan *: Terdapat ketidaklengkapan data

Lampiran 10

Kesimpulan Hasil Analisis Skalogram

Kabupaten / Kota	Tahun 2013				Tahun 2016			
	Jumlah Penduduk	Jumlah Jenis Fasilitas	Jumlah Unit Fasilitas	Orde Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Jenis Fasilitas	Jumlah Unit Fasilitas	Orde Kota
Kabupaten Sleman	1.141.684	19	15665	Orde I	1.167.481	19	10681	Orde I
Kabupaten Bantul	947.066	19	12404	Orde I	971.511	19	11983	Orde I
Kota Yogyakarta	402.709	19	7400	Orde I	412.704	19	4682	Orde I
Kabupaten Gunungkidul	700.192	19	11480*	Orde I	715.282	18	10244*	Orde II

Kabupaten Kulonprogo	403.2 03	18	6198	Orde III	412.198	17	3783	Orde III
-------------------------	-------------	----	------	-------------	---------	----	------	-------------

Keterangan *: Terdapat ketidaklengkapan data

Lampiran 11

Hasil Nilai Interaksi Wilayah antara Pusat Pertumbuhan dan *Hinterland* Tahun 2015

Kabupaten / Kota Asal	Kabupaten / Kota Tujuan	Penduduk daerah asal	Penduduk daerah Tujuan	Jarak i - j	(Jarak i- j) ^b	Angka Interaksi
(i)	(j)	(P _i)	(P _j)	(d _{ij})/km	(d _{ij}) ²	(A _{ij})
Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	971.511	715.282	41,3	1.705	407.568.522
	Kabupaten Kulonprogo	971.511	412.198	25,4	645,16	620.706.322
Kabupaten Sleman	Kabupaten Gunungkidul	1.167.481	715.282	54	2.916	286.377.964
	Kabupaten Kulonprogo	1.167.481	412.198	40,5	1.640	293.434.959
Kota Yogyakarta	Kabupaten Gunungkidul	412.704	715.282	38,5	1.482	199.190.109
	Kabupaten Kulonprogo	412.704	412.198	33	1.089	156.212.822

Lampiran 12

Hasil Nilai Interaksi Wilayah antara Pusat Pertumbuhan dan *Hinterland*

Kabupaten / Kota Asal	Kabupaten / Kota Tujuan	Penduduk daerah asal	Penduduk daerah Tujuan	Jarak i - j	(Jarak i - j) ^b	Angka Interaksi
(i)	(j)	(P _i)	(P _j)	(d _{ij})/km	(d _{ij}) ²	(A _{ij})
Kabupaten Sleman	Kabupaten Kulonprogo	1.141.684	403.203	40,5	1.640	280.689.276
Kabupaten Bantul	Kabupaten Kulonprogo	947.066	403.203	25,4	645,16	591.883.954
Kota Yogyakarta	Kabupaten Kulonprogo	402.709	403.203	33	1.089	149.103.284
Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Kulonprogo	700.192	403.203	59,4	3.528	80.022.538

Lampiran 13

Tabel Hasil Analisis dibandingkan Kebijakan RTRW dengan Data Tahun 2015

No.	Kecamatan	Hasil Analisis Skalogram	Hasil Analisis Gravitasi	Kebijakan RTRW
1.	Kabupaten Kulonprogo	Orde III	<i>Hinterland</i> Pusat Pertumbuhan (Bantul)	PKL
2.	Kabupaten Bantul	Orde I	Pusat Pertumbuhan Pertama	PPK, PKW, PKL
3.	Kabupaten Gunungkidul	Orde II	<i>Hinterland</i> Pusat Pertumbuhan (Bantul)	PKL
4.	Kabupaten Sleman	Orde I	Pusat Pertumbuhan Kedua	PKN, PKW, PKL
5.	Kota Yogyakarta	Orde I	Pusat Pertumbuhan Ketiga	PKN, PKL